

# **KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN EKOSISTEM MANGROVE DI LANTEBUNG KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

**ULFAH LUTFYYAH SYAM**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Email: Ulfahlutfyyahsyam@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Ulfah Lutfyyah Syam. 2019. Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Ibu Syarifah Balkis, S.Pd, M.Pd dan Bapak Muh.Said, S.Pd, M.Pd.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Gambaran kontrol sosial. 2) Faktor-faktor kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung 3) Upaya masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.*

*Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dan lembar pedoman wawancara, dan teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 1) Kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kota Makassar dilakukan dalam bentuk kontrol yang bersifat mengajak dan membimbing dan memaksa. 2) Faktor yang mempengaruhi kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove yakni masih kurangnya pemahaman pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sehingga tidak menerapkan sanksi/hukuman. 3) Upaya pemerintah dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung masih dalam sebatas kegiatan penanaman dan bantuan alokasi pendanaan. Tidak melakukan upaya khusus atau program yang berkepanjangan untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove.*

## PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan salah satu dari hutan rawa pesisir, yang terdiri dari rawa gembut, rawa air tawar, dan rawa mangrove ( Saptorini, 2003). Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama pada pantai yang terlindungi, serta muara sungai yang tergenang. Hutan mangrove tumbuh berbatasan dengan darat pada jangkauan air pasang surut, sehingga ekosistem ini merupakan daerah transisi yang tentunya kehidupannya pula dipengaruhi oleh faktor darat dan laut.

Pemerintah Indonesia sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan mempunyai wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan mangrove. Pengelolaan ekosistem di wilayah pesisir ini tidak lepas dari aturan dan landasan hukum yang ada. Landasan hukum pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Indonesia adalah Undang-Undang No.4 tahun 1960 tentang peraturan teritorial nasional di seluruh nusantara dan perairan sekitarnya di luar jarak 12 mil laut.<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1963 tentang batas kontinental pada kedalaman 200 m.<sup>2</sup> Undang-undang No.5 tahun 1983 tentang pengelolaan sumber daya pada 200 mil laut zona ekonomi eksklusif, dan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove tahun 2004.<sup>3</sup>

Hutan mangrove mempunyai berbagai macam peranan yang cukup besar yaitu sebagai berikut : 1. Hutan mangrove berperan sebagai sumber nutrisi, 2. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung pantai, 3. Hutan mangrove berperan sebagai penyedia kebutuhan manusia.<sup>4</sup> Melihat beberapa peranan dari hutan mangrove dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang sangat berperan penting terhadap lingkungan. Hutan mangrove juga merupakan salah satu hutan yang berpengaruh terhadap kebutuhan manusia.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.4 Tahun 1960 tentang Peraturan teritorial nasional.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1963 tentang batas kontinental pada kedalaman 200 m.

<sup>3</sup> Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Pengelolaan sumber daya dan strategi nasional pengelolaan ekosistem Mangrove.

<sup>4</sup> Supyan. "Peranan Hutan Mangrove". 24 Juni 2018. <https://faperik.wordpress.com/2012/11/19/peranan-hutan-mangrove/>.

Luas Hutan Bakau di Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia. Mencapai 25% dari total luas mangrove dunia. Namun sebagaimana kondisinya kritis. Beberapa tahun terakhir hutan mangrove banyak dikonversi dan direklamasi menjadi lahan non hutan seperti pertanian dan perikanan.

Kawasan mangrove di Sulawesi berkisar antara 53.000- 133.000 ha, atau sekitar 2 % dari luas total dari daerah yang bermangrove di Indonesia, namun demikian hal tersebut penting bagi masyarakat setempat, dan kecilnya ekosistem tersebut di Sulawesi itu sendiri merupakan alasan yang baik untuk melindungi dan mengupayakan pemeliharanya. Di Sulawesi kondisi pantai pada umumnya tidak ideal untuk mangrove dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya endapan rumput dan garis pantai yang terjal. Hanya ada sedikit di Sulawesi Utara sekitar 28.000 Ha, di Propinsi Sulawesi Selatan 54.259 Ha dan di Propinsi Sulawesi Tenggara seluas 54.259 Ha.

Luas hutan Mangrove di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 8,60 juta hektar dan yang telah mengalami kerusakan sekitar 5,30 juta hektar. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh konversi Mangrove menjadi kawasan pertambakan, pemukiman, dan industri, padahal mangrove berfungsi sangat strategis dalam menciptakan ekosistem pantai yang layak untuk kehidupan organisme akuatik. Keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai akan tetap terjaga apabila keberadaan mangrove dipertahankan karena mangrove dapat berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi. Mangrove juga merupakan tempat hidup berbagai jenis gastropoda, kepiting pemakan detritus, dan bivalvia pemakan plankton sehingga akan memperkuat fungsi mangrove sebagai biofilter alami.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah tentang Ekosistem Pantai tentang *Green Belt* (Sabuk Hijau) yaitu berjarak 400 meter dari garis pantai dan 10 meter dari muara sungai. Salah satu kawasan hutan mangrove yang dikonversi menjadi lahan non hutan adalah kawasan hutan mangrove di lantebung. Lantebung termasuk kawasan pantai Utara Kota Makassar, warga yang bermukim sekitar 379 KK. Lantebung memiliki hutan mangrove seluas 25 ha. Luas sebelah utara kurang lebih 1.000 x 250 m dan luas sebelah

selatan kurang lebih 700 x 50 m. Dan ditumbuhi tanaman bakau dan api-api. Namun, hutan mangrove yang terdapat di daerah tersebut setiap tahun makin berkurang luasnya, karena setiap tahun terjadi reklamasi. Kerusakan hutan mangrove tersebut berdampak pada masyarakat di Lantebung yang semakin kekurangan air bersih dan rumah mereka tergenang setiap kali air laut pasang.

Rehabilitasi dan pengelolaan hutan mangrove perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan mangrove dengan melibatkan banyak pihak, antara lain masyarakat Lantebung dan pemerintah setempat. Kondisi suatu hutan sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat sangat menentukan kondisi suatu kawasan hutan saat ini dan dimasa depan.

Olehnya penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang permasalahan tersebut yang fokus penelitiannya adalah “Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” Apakah permasalahan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah gambaran kontrol sosial pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ?
- Faktor apa yang mempengaruhi kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ?
- Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui gambaran kontrol sosial pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kontrol sosial dalam

pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove bagi peningkatan kualitas lingkungan sehingga tumbuh kesadaran untuk menjaga lingkungan khususnya memelihara hutan mangrove di kawasan Lantebung, fungsi mangrove akan dapat dioptimalkan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Makassar sebagai pembuat keputusan kebijakan pengelolaan hutan mangrove dapat dilakukan tindakan tepat dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan yang dapat merusak ekosistem yang ada sehingga kondisi alam dan lingkungan terutama hutan mangrove di Kawasan Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea ini tidak rusak. Jadi, dengan adanya kontrol sosial masyarakat terhadap pelestarian ekosistem mangrove ini dapat menjadi pengendali dan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup Mangrove tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan mengenai kontrol sosial masyarakat terhadap pelestarian ekosistem hutan mangrove di Lantebung. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai pegangan atau arahan bagi Masyarakat dan Pemerintah kota Makassar dalam melakukan pengembangan hutan mangrove. Dan juga menjadi salah satu kajian referensi bagi pihak – pihak yang mempunyai peran dalam mengambil kebijakan sosial untuk menyelesaikan berbagai masalah terjadi dimasyarakat untuk menjadikan daerah Lantebung sebagai daerah yang menjaga atau melestarikan hutan mangrove tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kontrol Sosial/ Pengendalian Sosial

##### a. Pengertian Kontrol Sosial/ Pengendalian Sosial

Kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang.

Menurut Soerjono Soekanto arti pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut Karel J.Veeger melihat pengendalian sosial sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.<sup>6</sup>

Menurut Roucek mendefenisikan kontrol sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat tinggal mereka.<sup>7</sup>

Dari berbagai batasan tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi

---

<sup>5</sup> J, Dwi.N & Bagong, S. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cetakan ke-3, Jakarta: Penerbit Kencana Pranamedia Group, hal.132.

<sup>6</sup> Elly, M.S, & Usman, K.2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, hal.252

<sup>7</sup> Syahrial Syarbaini; Rusdiyanta. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.92

norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya.

#### **b. Sifat-Sifat Pengendalian Sosial**

##### **1) Pengendalian Sosial Preventif**

Sifat pengendalian preventif adalah segala bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (*deviation*) agar dalam kehidupan sosial tetap kondusif (konformis). Adapun keadaan konformitas dari kehidupan sosial hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali. Dengan demikian, tindakan pencegahan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Misalnya:

- a) Polisi lalu lintas yang senantiasa berjaga-jaga di perempatan jalan sebagai langkah terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran lalu lintas.
- b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan sekolah agar peserta didik atau generasi muda tidak terjerumus pada pelanggaran hukum dan bertindak makar.
- c) Seorang guru memberikan tugas kepada para siswanya untuk mengerjakan karya tulis ilmiah sebagai langkah untuk mencegah agar para siswa tidak terlalu banyak bermain di kala liburan.

##### **2) Pengendalian Sosial Represif**

Pengendalian sosial secara represif adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (konformis). Dengan demikian, pengendalian sosial represif merupakan bentuk pengendalian di mana penyimpangan sosial sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi agar situasi sosial menjadi kembali normal, yaitu situasi dimana masyarakat mematuhi norma sosial kembali. Contoh:

- a) Polisi menertibkan tawuran antar desa dengan menggunakan tembakan agar para pelaku tawuran membubarkan diri.
- b) Polisi menggerebek rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan ganja.

- c) Seorang guru memberikan sanksi kepada siswanya yang bolos belajar.<sup>8</sup>

Pengendalian sosial yang satu ini dilakukan dengan cara yang tegas agar bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Secara umum pengendalian sosial tentu saja memiliki tujuan yang sangat jelas diantaranya adalah supaya masyarakat mematuhi peraturan.

## **2. Pelestarian Ekosistem**

### **a) Pengertian Pelestarian Ekosistem**

Kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapatkan tambahan (pe) dan akhiran (an), menjadi pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.<sup>9</sup>

Pelestarian Ekosistem Flora dan Fauna adalah menjaga secara utuh Flora dan Fauna agar tidak punah. Melestarikan Ekosistem Flora dan Fauna dengan cara upaya-upaya tertentu yang bisa melakukan pencegahan punahnya flora dan fauna. Dengan melestarikan ekosistem flora dan fauna kita memperoleh manfaat-manfaat yang sangat menguntungkan bagi alam dan makhluk hidup lainnya.

Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 1 butir 7, yaitu “rangkaiannya upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.<sup>10</sup>

### **b) Konsep Pelestarian**

Konsep penanggulangan terhadap pelestarian dan pemanfaatan

---

<sup>8</sup> Elly, M.S, & Usman, K.2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, hal.256

<sup>9</sup> Samhis setiawan. “Pelestarian Lingkungan Hidup”. 13 Maret 2018.

<http://www.gurupendidikan.co.id/pelestarian-lingkungan-hidup-pengertian-contoh-upaya-usaha-melestarikan/>.

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.59

lingkungan hidup, dilakukan dengan beberapa konsep, yakni:<sup>11</sup>

- 1) *Equilibrium Concept*. Dalam setiap upaya pembangunan selalu memperhitungkan daya dukung lahan. Selalu memperhitungkan “*non renewable resources*”, maupun sumber lain tidak dikuras habis. Selalu diperhatikan bahwa sumber daya alam tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi memperhatikan generasi mendatang. Dengan kata lain, selalu memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 2) *Eco Efficiency Concept*. Konsep ini mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berhasil dan terlaksana bila lingkungan selamat. Tidaklah akan ada artinya, bila pembangunan dilakukan tetapi lingkungan rusak dan tercemar.
- 3) *Eco Pricing Concept*. Dengan cara mendaur ulang limbah, akan didapat nilai tambah limbah. Pada hakikatnya limbah bukanlah masalah, dapat merupakan sumber daya alam, bila diolah dengan teknologi yang memadai.

### c) Pengertian Ekosistem

Ekosistem pada hakikatnya identik dengan lingkungan hidup alami, di dalamnya terdapat suatu tatanan yang sifatnya utuh menyeluruh yang dibentuk oleh hubungan atau interaksi dan interdependensi intra pengada insani dan pengada ragawi, yang di dalamnya terdapat sirkulasi materi, energi, dan informasi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 “Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.<sup>12</sup>

Menurut Resosoedarmo dkk Ekosistem adalah sistem ekologi yang dibentuk berupa kawasan alam di dalamnya terdapat unsur-unsur hayati (organisme) dan

unsur-unsur non hayati (unsur tak hidup), terdapat hubungan timbal balik.<sup>13</sup>

Dalam pemikiran ekosistem, sangat jelas bahwa hutan dan fungsi hutan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh manusia dalam memanipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan kehidupan dan lingkungan.

Berkaitan dengan ekosistem, Tucker dalam Hidir menjelaskan bahwa ekosistem adalah suatu ruang lingkungan dimana semua interaksi dan hubungan timbal-balik berlaku di antara segala makhluk hidup dan lingkungan fisik (tidak hidup) seperti air, tanah, udara, sinar matahari, dan ada lingkungan hidup (*biome*) yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup dan seluruh interaksinya. Jadi jelaslah, bahwa ekosistem berkenaan dengan fungsi struktur dan fungsi interaksi kehidupan organisme dengan lingkungan fisik, termasuk di dalamnya manusia sebagai makhluk biologis yang beradaptasi dalam berevolusi. Atau dengan kata lain, interaksi manusia dengan lingkungan adalah pemahaman yang integral dari konsep ekosistem.<sup>14</sup>

### 3. Mangrove

#### a) Pengertian Mangrove

Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis *mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Dalam bahasa Inggris, kata *mangrove* digunakan untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun tumbuhan tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis, kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan dan *mangal* untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut.<sup>15</sup>

Sementara Stenis mengatakan bahwa mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut,

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, hal.23

<sup>12</sup> Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ekosistem

<sup>13</sup> I Gusti Bagus Arjana. 2013. *Geografi Lingkungan Sebuah Introduksi*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 25.

<sup>14</sup> Hamdani Fauzi. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Cetakan pertama. Bandung: Karya Putra Darwati, hal. 17

<sup>15</sup> Aishing Kustanti. 2011. *Manajemen Hutan Mangrove*. Cetakan Pertama. Bogor: Penerbit PT IPB Press, hal.1

sehingga juga dinamakan hutan pasang.<sup>16</sup>

Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah batas pasang-surutnya air, tepatnya daerah pantai dan sekitar muara sungai. Tumbuhan tersebut tergenang di saat kondisi air pasang dan bebas dari genangan di saat kondisi air surut.

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi mayoritas pesisir pantai di daerah tropis & sub tropis yang didominasi oleh tumbuhan mangrove pada daerah pasang surut pantai berlumpur khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut dan tergolong dalam ekosistem peralihan atau dengan kata lain berada di tempat perpaduan antara habitat pantai dan habitat darat yang keduanya bersatu di tumbuhan tersebut.

Hutan mangrove juga berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan menetralkan bahan-bahan pencemar. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatorrhiza). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob. Pada hutan mangrove: tanah, air, flora dan fauna hidup saling memberi dan menerima serta menciptakan suatu siklus ekosistem tersendiri. Hutan mangrove memberikan masukan unsur hara terhadap ekosistem air, menyediakan tempat berlindung dan tempat asuhan bagi anak-anak ikan, tempat kawin/pemijahan, dan lain-lain. Sumber makanan utama bagi organisme air di daerah mangrove adalah dalam bentuk partikel bahan organik (detritus) yang dihasilkan dari dekomposisi serasah mangrove (seperti, ranting, dan bunga).

Hutan mangrove sangat berbeda dengan tumbuhan lain di hutan pedalaman tropis dan subtropis, ia dapat dikatakan merupakan suatu hutan di pinggir laut dengan kemampuan adaptasi yang luar

biasa. Akarnya, yang selalu tergenang oleh air, dapat bertoleransi terhadap kondisi alam yang ekstrem seperti tingginya salinitas dan garam. Hal ini membuatnya sangat unik dan menjadi suatu habitat atau ekosistem yang tidak ada duanya. Hutan di pinggir pantai biasa disebut sebagai hutan bakau. Sebenarnya, hutan tersebut lebih tepat dinamakan hutan mangrove. Istilah 'mangrove' digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindari kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri atas pohon bakau *Rhizophora spp.*

Karena bukan hanya pohon bakau yang tumbuh di sana. Selain bakau, terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Hutan mangrove mempunyai tajuk yang rata dan dapat serta memiliki jenis pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungan di mana hutan mangrove tumbuh, mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah, dan tanahnya tergenang air terus menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah beragam (*halophytes*), namun mangrove lebih bersifat *facultative* daripada bersifat *obligative* karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar. Flora mangrove terdiri atas pohon, epipit, liana, alga, bakteri dan fungsi.

## B. Kerangka Konsep

Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan mangrove lewat usaha penghijauan yang dilakukan terhadap hutan-hutan yang telah gundul/rusak, merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika. Namun yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove tersebut.

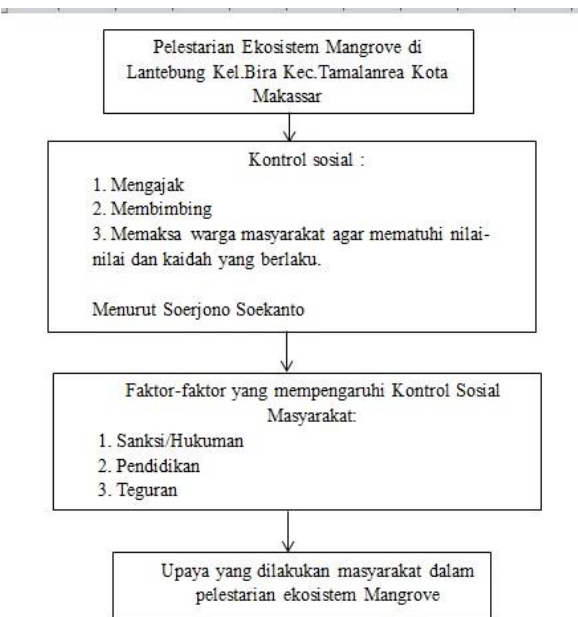
Pelestarian hutan mangrove merupakan suatu usaha yang kompleks untuk dilaksanakan karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Pada dasarnya kegiatan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari berbagai kepentingan. Namun demikian, sifat akomodatif ini akan lebih dirasakan manfaatnya bilamana keberpihakan kepada masyarakat yang rentan terhadap sumberdaya mangrove, diberikan porsi yang lebih besar.

Dengan demikian yang perlu diperhatikan adalah menjadikan masyarakat

<sup>16</sup> H.Kordi K. M. Ghufuran. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*. Cetaka Pertama. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. Hal. 10

sebagai komponen utama penggerak pelestarian hutan mangrove. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove perlu untuk diarahkan kepada cara pandang masyarakat akan pentingnya sumberdaya hutan mangrove

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat skema kerangka konsep berikut ini



Gambar 1. Skema Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berlandaskan dari tema yang diangkat dalam penelitian ini, serta melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dalam mengungkap masalah yang ada, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (*quality reseace*). Karena penelitian kualitatif *quality reseace* merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. Peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptiv research*), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Rifai. 2017. *Pemekaran Wilayah dan Perubahan Sosial Di KecamatanPitu*

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fikus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pedekatan kualitatif.<sup>18</sup>

Pendekatan kualitatif digunakan karena peniliti ingin mengungkap dan memahami secara mendalam sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui atau fenomena yang sedikit diketahui.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penilaian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis.<sup>19</sup> Sugiyono. 2016.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Lantebung. Yang terletak di kelurahan Bira kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan sesuai dengan topik serta agar memudahkan penulis memperoleh data.

C. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Penelitian.

1) Penelitian menyusun rencana yang akan dilaksanakan.

2) Peneliti memiliki lokasi penelitian sesuai dengan fokus

*Riase'Kabupaten Sidenreng-Rappang*. Tesis, Pasca Sarjana UNM, hal. 43.

<sup>18</sup> Yusuf A Muri. 2014. *Metode Penelitan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cetakan pertama. Jakarta: Prenamedia Group. Hal. 328

<sup>19</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-23. Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 15



penelitian dalam hal ini lokasi penelitian berada di Lantebung Kecamatan Bira Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar.

3) Melaksanakan seminar proposal.

4) Menyiapkan perangkat untuk melakukan penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai kontrol sosial terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

#### b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1) Melaksanakan observasi mendalam dengan berinteraksi secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai kontrol sosial terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

2) Melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kontrol sosial terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

3) Melakukan dokumentasi untuk memperkuat data-data yang diperoleh mengenai kontrol sosial terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

#### c. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kontrol sosial terhadap pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung Kel.Bira Kec.Tamalanrea Kota.Makassar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung (sumber kedua) umumnya diperoleh melalui

badan/dinas/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data.

### E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri dibantu dengan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### F. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, pedoman wawancara, recorder, kamera, dan alat penunjang lainnya. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mengkaji dan melengkapi data lainnya, dengan menggunakan instrumen panduan pengamatan.

Gunawan (2014) mengemukakan bahwa "Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan."<sup>20</sup>

b. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan dari responden berpedoman pada daftar pertanyaan yang telahdisiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip-arsip atau naskah-naskah yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penunjang.

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibitas) dan *confirmability* (objektivitas). Berdasarkan keempat syarat tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Validitas internal (*credibility*), yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, , hlm. 143.

penelitian dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan:

- 1) Perpanjangan pengamatan (*prolonged engagement*), yaitu turun ke lapangan mengecek kebenaran data yang telah diperoleh. Bila data didapat sudah benar maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.
- 2) Meningkatkan ketekunan (*persistent observation*) yaitu melakukan pengamatan secara berulang dan berkesinambungan pada berbagai objek lokasi penelitian.

b. Validitas eksternal (*keteralihan/transferability*), pembuktian hasil penelitian apakah bisa digeneralisasikan pada setting sosial yang berbeda tetapi mempunyai karakteristik yang sama.

c. Kebergantungan (*dependability/reliabilitas*), dimana hasil penelitian merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya.

d. Kepastian/objektivitas (*confirmability*), dilakukan bersamaan dengan *dependability*, untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.

#### **H. Analisis Data**

Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif murni, maksudnya adalah mengidentifikasi, menemukan, dan menafsirkan berbagai temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk lebih jelasnya gambaran teknik analisis data dapat dilihat pada penjelasan:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Melakukan analisis data dengan cara merumuskan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuat kategori sehingga memberikan gambaran agar yang jelas serta mempermudah peneliti dan menganalisis data selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) informasi wawancara yang diperoleh dari sejumlah informan dicatat dan dituangkan dalam bentuk tabulasi data, (2) data yang telah dicatat dan ditabulasi diseleksi sehingga yang diambil hanya yang dianggap paling representative untuk disajikan sebagai data.

b. Penyajian data (*display data*)

Mengorganisasikan data, membuat kedalam pola, membuat uraian singkat bagan, hubungan antara kategori, langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) data yang telah diseleksi di internalisasikan dan direlevansi dengan data etik, (2) informan yang diperoleh dari wawancara di interpretasikan untuk memberikan gambaran mendeskripsikan fokus-fokus masalah.

c. *Conclusion Drawing/Verivication*.

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang terkumpul kemudian diverifikasi terus menerus selama proses penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga kesimpulan terakhir dapat dipertanggungjawabkan.

Penarikan kesimpulan setelah menyajikan data peneliti akan menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) mendeskripsikan fokus masalah yang telah diinterpretasi dan dilakukan penarikan kesimpulan, (2) kesimpulan sementara direlevansikan dengan hasil observasi lapangan, sehingga memperoleh pemahaman masalah yang sesuai dengan kajian teoritis. (3) melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikan sebagai hasil penelitian.

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian**

###### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Tamalanrea terbentuk sejak 7 Januari 1998 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Biringkanaya dan memiliki luas area kurang lebih 31,84 km<sup>2</sup> atau 18,2% dari luas Kota Makassar. Adapun kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tamalanrea yakni berjumlah 8 kelurahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 11.651 jiwa (data tahun 2015). Jumlah penduduk ini terdiri dari 5.699 jiwa laki-laki dan 5.952 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.737 KK.

Secara geografis Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar terletak diantara -05°09'05.845" S dan 119°47'13.044" E. Secara administrasi Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar memiliki luas wilayah 9,26 km<sup>2</sup> dengan batasan wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Lantebung merupakan tempat pelestarian ekosistem mangrove dan sekaligus sebagai tempat wisata bagi penduduk Kota Makassar. Lantebung terletak di RW 5 RT 4 dengan jumlah penduduk sekitar 379 Kepala Keluarga. Masyarakat yang ditinggal di Lantebung didominasi oleh nelayan sebagai mata pencaharian mereka.

Pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dikelola oleh PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Nasrullah selaku ketua Kelompok PSDA Mangrove Lantebung (wawancara 09 November 2018), mengatakan bahwa :

“Disini itu ada sepuluh kelompok PSDA, satu kelompok itu dikhususkan untuk menangani itu mangrove, dalam satu kelompok itu ada 20 anggotanya. Disitu dibagi lagi, ada yang khusus memang pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Karena yang paling penting itu pemeliharaannya kalau sudah ditanam mangrove”

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka peranan penting dalam pelestarian ekosistem mangrove ditangani oleh PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung. Disamping itu, peran dan partisipasi masyarakat juga sangat menentukan terhadap kelestarian ekosistem mangrove.

## **2. Data Potensi dan Kondisi Terkini PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung**

CCD-IFAD (*Coastal Community Development – International Found for Agricultural Development*) Kota Makassar bersama dengan masyarakat Lantebung membentuk kelompok masyarakat nelayan yang terfokus pada pengelolaan sumber daya alam mangrove. Visi dari kelompok tersebut yakni untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Kelompok tersebut dibentuk dengan difasilitasi oleh DKP3 Kota Makassar pada tahun 2015.

Kelompok tersebut dinamai dengan Kelompok Masyarakat PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung yang fokus pada kegiatan penanaman mangrove, prasarana monitoring, dan pembibitan mangrove.

### **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Gambaran Kontrol Sosial Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar**

Kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kota Makassar dilakukan dalam bentuk kontrol yang bersifat mengajak dan membimbing. Penerapan kontrol sosial tersebut mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung. Sedangkan, kontrol sosial yang bersifat memaksa tidak dilakukan oleh pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung. Dikarenakan pemahaman tentang pengaturan hukum tentang pelestarian lingkungan hidup masih rendah dan tidak adanya sanksi yang disepakati bersama untuk diterapkan.

##### **a. Mengajak**

Pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung dengan cara kontrol sosial yang bersifat mengajak, diharapkan agar warga atau masyarakat di Lantebung dapat secara bersama-sama dalam melestarikan ekosistem mangrove. Kontrol sosial dengan cara mengajak dilakukan dengan maksud untuk mencegah tindakan atau perilaku-perilaku masyarakat yang berpotensi melakukan pengrusakan ekosistem mangrove tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kontrol sosial yang dilakukan dengan cara mengajak

telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove. Kontrol sosial yang dilakukan yakni dalam bentuk himbauan kepada warga masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pelestarian ekosistem mangrove.

Hasil daripada dilakukannya kontrol sosial tersebut menjadikan masyarakat di Lantebung turut serta dalam pelestarian ekosistem mangrove. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Lantebung terlibat dalam kegiatan pelestarian ekosistem mangrove, terlebih bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Faktor penghambat sehingga masyarakat tidak ikut serta dalam pelestarian ekosistem, disebabkan oleh faktor kesibukan dan pekerjaan yang digelutinya. Lain halnya dengan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yang memiliki banyak waktu luang.

#### **b. Bimbingan**

Kontrol sosial dalam bentuk bimbingan merupakan lanjutan dari kontrol sosial yang dilakukan dalam bentuk mengajak/ajakan. Kontrol sosial dalam bentuk bimbingan diharapkan agar masyarakat tidak hanya ikut serta dalam penanaman mangrove saja, melainkan mempunyai keilmuan atau pengetahuan untuk melestarikan ekosistem mangrove. Sehingga dengan dilakukannya hal tersebut, kesadaran masyarakat akan tumbuh dalam melestarikan ekosistem mangrove.

Kesadaran masyarakat mengenai kelestarian ekosistem mangrove di Lantebung dinilai sudah. Sebagaimana keterangan yang diberikan masyarakat pada saat dilakukannya penelitian, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat turut serta dalam kegiatan penanaman mangrove dari hasil sosialisasi/penyampaian dari Pemerintah setempat atau PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung.

#### **c. Memaksa**

Kontrol sosial yang dilakukan secara memaksa, merupakan bentuk kontrol sosial yang bersifat mengikat dalam pelaksanaannya. Kontrol sosial yang dilakukan secara memaksa biasanya disertai dengan sanksi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial dengan memaksa tidak

dilakukan dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

Pemahaman pemerintah setempat dan juga PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sebagai pengendali dan penanggung jawab kelestarian ekosistem mangrove Lantebung masih belum memahami secara terperinci pengaturan hukum tentang pelestarian lingkungan hidup.

Disamping itu, pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) mangrove Lantebung juga tidak menentukan atau melakukan kesepakatan bersama dengan masyarakat sendiri tentang sanksi atau hukuman yang diberikan jika ada masyarakat yang melakukan tindakan pengrusakan mangrove. Olehnya itu, kontrol sosial yang bersifat memaksa tidak dapat dijalankan atau diterapkan dalam pelestarian ekosistem mangrove.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kontrol sosial yang dilakukan dalam pelestarian ekosistem diperuntukkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam pelestarian ekosistem mangrove, seperti dengan penerapan kontrol sosial yang bersifat mengajak dan membimbing. Secara tidak langsung penerapan kontrol sosial tersebut akan menimbulkan rasa kepedulian masyarakat akan kelestarian mangrove di Lantebung.

### **2. Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Sosial dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar**

#### **a. Sanksi/ Hukuman**

Pemberian sanksi atau hukuman dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung termasuk dalam kategori kontrol sosial yang penerapannya secara memaksa. Dengan adanya sanksi atau hukuman masyarakat menjadi memiliki ketakutan untuk melakukan tindakan pengrusakan mangrove. Sama seperti pembahasan sebelumnya terkait dengan kontrol sosial yang bersifat memaksa dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pelestarian ekosistem mangrove pemerintah setempat ataupun PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) mangrove Lantebung tidak menerapkan/memberlakukan kontrol sosial yang bersifat memaksa. Sebagaimana kenyataan yang ditemukan pada saat

penelitian bahwa tidak ada masyarakat yang pernah diberikan sanksi terkait dengan tindakan pengrusakan mangrove.

Tindakan tersebut tidak dilakukan dikarenakan masih kurang pahamnya PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung itu sendiri dalam pemberian sanksi. PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sendiri tidak menerapkan, mengatur dan menentukan mengenai sanksi atau hukuman apa yang mesti diterapkan jika ada masyarakat yang melakukan pengrusakan mangrove. Pihaknya hanya mengetahui bahwa pemberian sanksi atau hukuman hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah kota Makassar.

#### **b. Pendidikan**

Masyarakat sendiri merasa sangat perlu untuk mendapatkan pendidikan atau pengetahuan tentang pelestarian ekosistem mangrove. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Lantebung antusias akan keterlibatannya dalam pelestarian ekosistem mangrove.

Respon masyarakat untuk ikut serta dalam penyuluhan yang dilakukan oleh PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung membuktikan bahwa PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung dan masyarakat Lantebung memiliki sinergitas yang baik dalam melestarikan mangrove di Lantebung.

Dalam penelitian yang dilakukan, PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung menetapkan jadwal penyuluhan kepada masyarakat. Pihaknya pun menilai bahwa masyarakat antusias dalam mengikuti penyuluhan yang dilakukannya. Masyarakat pun menilai bahwa PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sangat berperan penting dan bermanfaat dalam melestarikan ekosistem mangrove di Lantebung.

#### **c. Teguran**

Teguran merupakan kritik sosial yang dilakukan dengan cara terbuka dan langsung dikarenakan khawatir akan akibat yang bisa terjadi dari kesalahan yang dilakukan. Teguran pada dasarnya bertujuan baik, maka dari itu kontrol sosial dalam bentuk teguran sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh pemerintah Lantebung terhadap masyarakatnya, teguran telah sering diberlakukan oleh pemerintah

setempat dalam mengontrol pelestarian ekosistem Mangrove di Lantebung.

### **3. Upaya Dalam Pelestarian Ekosistem Mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar**

#### **a. Peran Pemerintah**

Pemerintah Kota Makassar mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Makassar dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung sudah ada. Beberapa kali pemerintah kota Makassar melakukan kegiatan-kegiatan penanaman mangrove. Hanya saja untuk tingkat maksimalnya pelestarian ekosistem mangrove, pemerintah tidak cukup dengan kegiatan penanaman saja. Melainkan harus adanya upaya-upaya yang berkelanjutan yang dicanankan oleh pemerintah, sehingga mangrove dapat dijaga kelestariannya untuk jangka waktu berkepanjangan.

Keterlibatan pemerintah pada Kelompok Masyarakat PSDA (Pengelola sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung telah ada, misalnya dalam bentuk bantuan dana yang dialokasikan ke PSDA tersebut. Perhatian utama pemerintah dalam kelestarian ekosistem mangrove yakni dengan menjadikan Lantebung sebagai kawasan ekowisata mangrove, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan pondok wisata dan jembatan yang dapat digunakan untuk mengakses tanaman mangrove.

Pemerintah dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung masih perlu melakukan upaya yang berupa pembentukan program khusus atau program jangka panjang. Kegiatan atau program yang dimaksudkan misalkan berupa kegiatan rehabilitasi dan penanaman mangrove dengan waktu tertentu. Sehingga kelestarian

ekosistem mangrove di Lantebung dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

#### **b. Peran Masyarakat**

Selain daripada hal tersebut, masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pelestarian ekosistem mangrove. Masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran akan kelestarian ekosistem mangrove, sehingga tindakan-tindakan yang berpotensi merusak tanaman mangrove dapat diminimalisir meski tanpa diawasi. Kesadaran tersebut tentunya tidak dapat tumbuh dan berkembang begitu saja, melainkan mesti melalui tahap-tahap sosialisasi dengan muatan edukasi tentang mangrove.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sudah memiliki kesadaran terkait dengan kelestarian ekosistem mangrove. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari segi antusiasnya masyarakat setempat untuk ikut serta dalam kegiatan penanaman mangrove. Menurut peneliti sendiri, tingkat kesadaran tertinggi masyarakat saat ini dalam melestarikan ekosistem mangrove yakni dengan tidak merusaknya tanaman mangrove itu sendiri.

PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) mangrove Lantebung sebagai penanggungjawab utama kelestarian ekosistem mangrove di Lantebung termasuk berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berujung pada keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan mangrove.

Kesadaran masyarakat tersebut tidak terlepas dari penerapan kontrol sosial yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) itu sendiri. Kontrol sosial sekaligus sebagai ajang sosialisasi yang dilakukan telah menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat tidak merusak mangrove yang ada di Lantebung.

#### **Kesimpulan**

1. Kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kota Makassar dilakukan dalam bentuk kontrol yang bersifat mengajak dan membimbing. Penerapan kontrol sosial tersebut mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung. Sedangkan, kontrol sosial

yang bersifat memaksa tidak dilakukan oleh pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung. Dikarenakan pemahaman tentang pengaturan hukum tentang pelestarian lingkungan hidup masih rendah dan tidak adanya sanksi yang disepakati bersama untuk diterapkan.

2. Faktor yang mempengaruhi kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove yakni masih kurangnya pemahaman pemerintah setempat dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sehingga tidak menerapkan sanksi/hukuman. Masyarakat di Lantebung telah memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pelestarian ekosistem mangrove, hal tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian ekosistem mangrove. PSDA sendiri dinilai sudah cukup berperan penting dalam menyadarkan masyarakat dengan rutin atau terjadwalnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan.
3. Upaya pemerintah dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung masih dalam sebatas kegiatan penanaman dan bantuan alokasi pendanaan. Tidak melakukan upaya khusus atau program yang berkepanjangan untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Masyarakat sendiri dalam pelestarian ekosistem mangrove yakni dengan ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) mangrove Lantebung.

#### **Implikasi**

Penelitian ini ditujukan kepada untuk memberikan gambaran, pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan kontrol sosial dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu penerapan kontrol sosial yang bersifat mengajak dan membimbing sehingga masyarakat sadar akan kelestarian ekosistem mangrove itu sendiri, dengan begitu masyarakat akan tidak melakukan tindakan-tindakan pengrusakan mangrove.

## Saran

1. Pemerintah, sebagai penanggung jawab kelestarian lingkungan hidup, dapat memberikan perhatian khusus dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung. Perhatian khusus yang dimaksud yakni dengan mengeluarkan kebijakan atau program khusus tentang pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung dan lebih meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung sehingga kinerja dari kelompok masyarakat tersebut dapat lebih meningkat dan terfokus dalam pelestarian ekosistem mangrove.
2. PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung, sebagai pengelola pelestarian mangrove di Lantebung perlu untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan lanjutan mengenai metode pembibitan atau rehabilitasi mangrove, sehingga tingkat pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung tidak hanya sebatas pada kegiatan penanaman mangrove saja. Sehingga Lantebung dapat menjadi pemasok bibit mangrove untuk daerah/kawasan lainnya yang serupa.
3. Masyarakat, agar dapat bekerjasama dengan PSDA (Pengelola Sumber Daya Alam) Mangrove Lantebung dan Pemerintah setempat dalam kegiatan-kegiatan pelestarian ekosistem mangrove, serta dapat menggalang atau mengajak masyarakat yang lainnya untuk sama-sama terlibat dalam pelestarian ekosistem mangrove di Lantebung.
4. Peneliti, agar karya tulis ini dapat menjadi referensi bagi dan sebagai bahan pembelajaran/pengetahuan terhadap penelitian yang serupa.

## REFERENSI

- Arjana I Gusti Bagus. 2013. *Geografi Lingkungan Sebuah Introduksi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Elly, M.S, & Usman, K. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Fauzi Hamdani. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Bandung: Penerbit CV. Karya Putra Darwati.

- H.Kordi K M. Ghufuran. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- J, Dwi.N, & Bagong, S. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group
- Kustanti, Aishling. 2011. *Manajemen Hutan Mangrove*. Cetakan Pertama. Bogor: Penerbit PT IPB Press
- Rahmadi Takdir, 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2017. *Pemekaran Wilayah dan Perubahan Sosial Di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng-Rappang*. Makassar: Tesis, Pasca Sarjana UNM.
- Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabet
- Syarbaini, Rusdiyanta. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Penerbit Prenamedia Group.